

RINGKASAN

Hannasya Anggraini 210510270 **Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.**
(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M).

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan dalam partai lokal di Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal dan Upaya Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Dalam penelitian ini penulis menganalisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang dimana dalam Pasal 75 ayat (2) yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal di Aceh dengan jumlah kuota 30%.

Hasil dari penelitian ini yaitu Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu Keberadaan perempuan hanya bersifat simbolik seperti tidak diberinya kewenangan yang nyata dalam kepengurusan partai atau ikut dalam lembaga legislatif. Sehingga dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan, seperti adanya patriarki, kurangnya pendidikan, dan sumber daya terbatas serta belum maksimalnya persiapan dari calon perempuan itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan yaitu rekrutmen dan kaderisasi perempuan, *Affirmative Action*, pendidikan politik bagi perempuan, menghapus hambatan kultural dan *stereotip gender*, dan advokasi terhadap kaum perempuan.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh diharapkan untuk mempertegas aturan dalam Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2006 dengan kuota minimal 30% serta meningkatkan implementasi keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai maupun parlemen pemerintahan. Negara harus mengadopsi Undang-undang yang secara tegas menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini termasuk dalam hal hak untuk memilih dan dipilih.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Partai Politik Lokal, Partisipasi Politik

SUMMARY

Hannasya Anggraini
210510270

***Women's Representation In ocal Political Parties
Based On Law Number 6 of 2006 On
TheGovernmentof Aceh.
(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H danDr. Muhammad
Nasir, S.H., LL.M).***

Women's representation is the provision of equal opportunities and status for women to fulfill their roles in the executive, judicial, legislative, political parties, and general elections, towards gender justice and equality. Women's representation in local parties in Aceh is regulated by Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This study aims to determine and analyze the representation of women in local political parties and the efforts of local political parties to increase women's participation and representation according to Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh.

This study uses a normative juridical research method with a statute approach. In this study, the author analyzes Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, which in Article 75 paragraph (2) regulates women's representation in local political parties in Aceh with a quota of 30%.

The results of this study are Women's Representation in Local Political Parties based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, namely the existence of women is only symbolic, such as not being given real authority in party management or participating in legislative institutions. So that in its implementation, there are still various obstacles, such as patriarchy, lack of education, and limited resources as well as the less than optimal preparation of female candidates themselves. Efforts made by Local Political Parties in Increasing Women's Participation include recruitment and cadre formation of women, Affirmative Action, political education for women, eliminating cultural barriers and gender stereotypes, and advocacy for women.

The Aceh Government Law is expected to reinforce the provisions in Article 75 of Law No. 11 of 2006, which stipulates a minimum quota of 30%, and to increase the implementation of women's representation in party and parliamentary structures, not just quotas. The state must adopt laws that explicitly eliminate all forms of discrimination against women, particularly in the context of general elections. This includes the right to vote and be elected.

Keywords: Women's Representative, Local Political Parties, Political Participan